

Analisis Kemiskinan di Kota Pagar Alam

Bayu Dimas Sanjaya¹, Syamsurijal A. Kadir² dan Fachrizal Bachri^{2*}

¹ Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

² Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

* Email penulis korespondensi: fachrizalbachri@unsri.ac.id

Abstract: This study aimed to analyze the influence of education level of head of family, number of dependents and asset of head of family on poverty in District of South Pagaralam and North Pagaralam. The data is used in this study are primary data obtained through research directly to the society in November 2016. The method used is a quantitative approach by applying multiple regression models. Based on the research and data processing using multiple regression analysis that education and asset of heads of family have a significant effect on poverty. Meanwhile, head of family number of dependents do not have a significant effect on poverty.

Keywords: Poverty, education, number of dependents, asset

JEL Classification: I30, I32

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang sering dialami oleh negara berkembang yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti, lapangan pekerjaan, pendidikan, pengangguran, akses terhadap barang dan jasa, kesehatan, lokasi dan lain-lain. Menurut Bachri (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah, yang tercermin di dalam lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktifitas, terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2013), Kemiskinan merupakan ketidakmampuan berpartisipasi dalam bermasyarakat secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, pengenalan dan pemahaman terhadap kondisi dan penyebab kemiskinan sangat penting dilakukan agar dapat disusun strategi penanggulangan kemiskinan secara tepat. Adapun penyebab kemiskinan tersebut antara lain karenerbatasnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar, seperti transportasi, komunikasi/informasi, pasar, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Sebagai contoh, sarana dan prasarana transportasi yang terbatas menyebabkan banyaknya daerah terisolasi sehingga mengakibatkan sistem perekonomian masyarakat tidak berfungsi. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai menyebabkan keluhan masyarakat terhadap suatu penyakit tidak teratasi dengan capat (Abukosim, dkk, 2010).

Ada banyak sumber yang dipergunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan di Dunia. Contohnya, bank dunia yang mengukur tingkat kemiskinan dengan tidak tercapainya penghasilan US \$ 1 per hari per kapita maka kehidupan penduduk tersebut belum layak atau masih dalam kategori miskin. Sedangkan di Indonesia, banyak lembaga yang mengatur tentang batas kemiskinan di Indonesia seperti pengukuran tingkat kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang mengacu pada besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu per bulan tersebut.

Di Pagar Alam sendiri masih banyak masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan yang telah ditentukan oleh BPS Kota Pagar Alam. BPS dalam menyusun garis kemiskinan di Kota Pagaralam ini menggunakan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Indeks Kemiskinan Manusia merupakan ukuran yang diukur dari tiga dimensi. Pertama, kekurangan kesempatan hidup yang

lama dan sehat yaitu resiko kematian pada usia yang relatif muda yang diukur dengan peluang saat lahir untuk dapat hidup tidak sampai usia 40 tahun. Kedua, kekurangan akses pengetahuan, yaitu halangan dari dunia baca dan komunikasi yang diukur dengan angka buta huruf orang dewasa. Ketiga, kekurangan pencapaian standar hidup yang layak yaitu keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi yang diukur dari persentase penduduk tidak menggunakan sumber air bersih dan persentase anak dengan berat badan kurang sesuai dengan umurnya. Berikut ini merupakan data kemiskinan di Kota Pagar Alam

Tabel 1. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Pagar Alam, 2009-2014

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah (000 Jiwa)	Persentase
2009	199.053	11,2	9,66
2010	213.574	12,4	9,81
2011	234.189	11,4	9,24
2012	244.358	11,7	9,00
2013	249.089	11,8	9,00
2014	261.261	11,8	8,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam 2014

Tabel 1 memperlihatkan garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di Kota Pagar Alam selama periode 2009-2014. Jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu 2009-2014 seperti tidak mengalami banyak perubahan karena persentase penduduk miskin di Pagar Alam masih berada di kisaran angka 9% walaupun mengalami penurunan dari angka 9,66% pada tahun 2009 menjadi 9,00%. Namun, jumlah penduduk miskin justru mengalami peningkatan pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin berjumlah 11,2 ribu jiwa menjadi 11,8 jiwa pada tahun 2014 atau mengalami peningkatan sebesar 0,6 ribu jiwa. Angka 11,8 ribu jiwa yang masih hidup dibawah garis kemiskinan kota Pagaralam menunjukkan bahwa masalah kemiskinan masih menjadi masalah yang cukup serius di Kota Pagar Alam.

Kota Pagar Alam memiliki 5 kecamatan dengan luas dan penyebaran penduduk yang tidak sama, kecamatan yang memiliki luas terbesar adalah Kecamatan Dempo Selatan dengan luas sebesar 217,95 km² sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Pagar Alam Utara dengan luas sebesar 55,47 km². Namun, kepadatan penduduk justru tidak berada di kecamatan yang memiliki luas terbesar, tetapi, penduduk terbanyak berada di 2 kecamatan yaitu Pagar Alam Utara dan Pagar Alam Selatan sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Dempo Selatan dan Dempo Tengah.

Kota Pagar Alam yang memiliki lima kecamatan dengan jumlah penduduk miskin yang berbeda dari setiap kecamatan yang ada di Kota Pagar Alam tersebut. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Kecamatan Pagar Alam Utara dengan jumlah penduduk miskin sebesar 8.668 jiwa kemudian disusul oleh Kecamatan Pagar Alam Selatan dengan jumlah 7.279 jiwa. Kecamatan yang memiliki penduduk miskin terendah adalah Kecamatan Dempo Selatan dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.631 jiwa.

Berdasarkan asumsi dasar teori human capital, seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Pendidikan yang lebih tinggi mengakibatkan produktivitas kerja yang lebih baik, oleh sebab itu akan menghasilkan penghasilan yang lebih besar (Simanjuntak, 1998).

Tabel 2. Luas Wilayah, jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Pagar Alam, 2014

Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk (Orang)		Kepadatan Penduduk
	Km ²	%	Jumlah	%	(orang/km ²)
Dempo Selatan	217,95	34,39	11.713	8,84	53
Dempo Tengah	173,09	27,32	12.819	9,67	74
Dempo utara	123,98	19,57	20.395	15,39	164
Pagaralam Selatan	63,17	9,97	47.404	35,78	750
Pagaralam Utara	55,47	8,75	40.167	30,32	724
Pagaralam	633,66	100	132.498	100	209

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam 2014

Menurut Jinghan (2008), penambahan penduduk sebagai akibat dari tingginya kelahiran menyebabkan beban hidup keluarga semakin berat. Beban hidup keluarga semakin berat karena sebagian besar jumlah tanggungan keluarga tidak menghasilkan bahkan menyita pendapatan berupa makanan dan minuman. Makin banyak keluarga yang ditanggung makin sulit pula kesempatan para pekerja menabung untuk keperluan investasi peralatan dan modal, disamping memperkecil kesempatan pendidikan bagi anak-anak dan keperluan hidup lainnya.

Kemiskinan pada rumah tangga juga berkaitan dengan aset yang dimiliki. Semakin besar aset yang dimiliki maka akan semakin besar juga peluang untuk menjadi tidak miskin, karena memiliki modal awal untuk memulai kehidupan baru. Indikator dari kepemilikan aset diantaranya kepemilikan lahan, kepemilikan tempat tinggal, maupun kepemilikan kendaraan atau alat transportasi. (Sa'diyah & Fitrie, 2012). Berdasarkan uraian di atas, fenomena kemiskinan di Kota Pagar Alam masih sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh tingkat pendidikan kepala keluarga, jumlah tanggungan dan kepemilikan asset terhadap kemiskinan di Kecamatan Pagar Alam Utara dan Pagar Alam Selatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Kemiskinan Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Rendahnya tingkat kehidupan yang sering sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu mata rantai dari munculnya lingkaran kemiskinan. Sementara itu, kemiskinan dapat dilihat dari standar hidup layak, artinya kita melihat apakah seseorang atau suatu keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Lebih lanjut diartikan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standar hidup layak tidak tercapai. Kebutuhan dasar yang dimaksud seperti makanan, pakaian, rumah atau tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan (Maipita, 2014).

Menurut Todaro (2006) mengemukakan kemiskinan absolut, yaitu sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk tersebut hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau dibawah garis kemiskinan internasional. Selain itu menurut Bahri (2010) kondisi kemiskinan adalah satu dari tiga kriteria penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Apabila suatu bangsa telah berhasil tumbuh kemakmurannya secara rata-rata namun kemiskinan masih terus menerus dirasakan oleh sebagian penduduknya, maka tentulah sulit mengatakan bahwa pembangunan telah benar-benar berhasil.

2.1. Konsep Kemiskinan

Menurut Latief (1997) Sampai saat ini belum ada definisi konsep mengenai kemiskinan yang tepat dan disepakati bersama secara bulat. Puluhan definisi dirumuskan menurut persepsi dan konteks negara serta disiplin ilmunya masing-masing. Namun, dengan berpijak pada berbagai

literatur yang ada, paling tidak ada lima jenis kemiskinan yang secara prinsip perlu dipahami sebagai berikut:

- Kemiskinan alami merupakan kemiskinan yang timbul di suatu daerah, karena sumberdaya alamnya kurang mendukung terhadap penghidupan penduduk. Misalnya kering, tandus, rawan bencana alam, dan lain-lain.
- Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang timbul di suatu wilayah, karena daerahnya tidak mempunyai sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang kehidupan masyarakat. Sehingga penduduk kurang akses untuk mendapatkan peluang ekonomi yang ada.
- Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang timbul karena faktor sifat dan budaya manusia itu sendiri, yang kurang mendukung untuk perbaikan kehidupannya. Sifat seperti ini misalnya malas, menerima apa adanya, kurang tanggap terhadap kemajuan pembangunan, dan lain-lain.
- Kemiskinan absolut adalah keadaan penduduk dimana pendapatannya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk dapat hidup secara layak.
- Kemiskinan relatif adalah keadaan penduduk dalam satu lingkungan perkampungan tertentu, dimana status ekonomi sosialnya berada pada lapisan paling bawah diantara keluarga penduduk disekitarnya.

Menurut Bahri (2010) merumuskan enam ciri mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan, yaitu : Pertama, mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan; kedua, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri; ketiga, tingkat pendidikan mereka rendah, tak sampai tamat sekolah dasar; keempat, kebanyakan mereka tinggal dipedesaan; kelima, banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak memiliki keterampilan (skill) atau pendidikan, sedangkan kota di banyak negara sedang berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi masyarakat desa ini.

Kriteria Kemiskinan Menurut BPS Pengertian kemiskinan antara satu Negara dengan Negara lain juga berbeda. Pengertian kemiskinan di Indonesia yang dibuat oleh BPS. Lembaga tersebut mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besarnya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan. Dalam konteks itu, pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan untuk penentuan kriteria tersebut. Kriteria statistik BPS (2014) tersebut adalah

- (1) Tidak miskin, mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp. 350.610.
- (2) Hampir Tidak Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488 - Rp 350.610 atau sekitar antara Rp 9.350 - Rp11.687 per orang per hari. Jumlahnya mencapai 27.12 juta jiwa.
- (3) Hampir Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp. 233.740 - Rp. 280.488 atau sekitar antara Rp. 7.780 - Rp 9.350 per orang per hari. Jumlahnya mencapai 30.02 juta.
- (4) Miskin, dengan pengeluaran per orang perbulan per kepala Rp 233.740.-kebawah atau sekitar Rp. 7.780 kebawah per orang per hari. Jumlahnya mencapai 31 juta.
- (5) Sangat Miskin (kronis), tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlas pastinya. Namun, diperkirakan mencapai sekitar 15 juta.

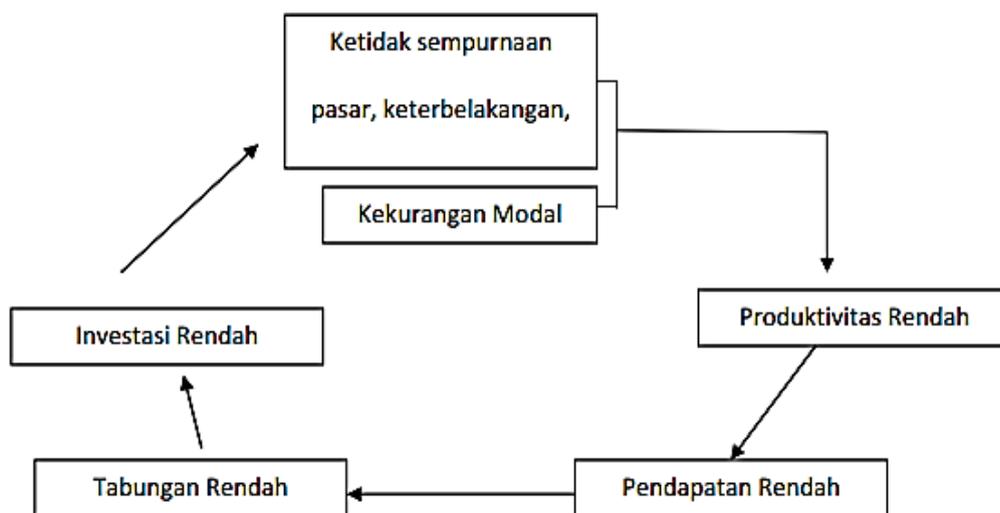
Selain kriteria diatas BPS juga telah membuat beberapa Indikator keluarga miskin sehubungan dengan penentuan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam penetapan keluarga miskin yang berhak menerima bantuan ini, pemerintah menggunakan acuan dari BPS tentang 14 (empat belas) Kriteria Kemiskinan, yaitu:

- (1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- (2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- (3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- (4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- (5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- (6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- (7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.

- (8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- (9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- (10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- (11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- (12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
- (13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- (14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

2.2. Teori Kemiskinan

Sharp, et al (1996) dan Kuncoro (1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (Vicious circle of poverty).



Gambar 1. Lingkaran Kemiskinan

Sumber: R. Nurkse (1961)

Teori ini ditemukan oleh R. Nurkse (1961) yang mengatakan *"a poor country is poor because it is poor"* (Negara miskin itu miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Kuncoro, 1997). Berikut gambar lingkaran setan kemiskinan (Vicious circle of poverty)

2.3. Penelitian Terdahulu

Abukosim, dkk (2010) dalam penelitian menemukan bahwa kemiskinan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi hak dasar

(pangan, perumahan dan pakaian), kekurangan pelayanan dan barang-barang, kondisi kehidupan sehari-hari yang serba kekurangan, pekerjaan yang tidak menentu, pendidikan dan keahlian yang rendah dan ketidaksamaan kesempatan pada sejumlah orang dalam menjalani kehidupan.

Vidiawan dan Tisnawati (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa secara simultan pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat miskin di Desa Batu Kandik, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Kedua secara parsial pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat miskin di Desa Batu Kandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

Sa'diyah dan Fitri (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Dari tiga faktor yang diteliti (pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan kepemilikan aset) terbukti bahwa tingkat pendidikan dan kepemilikan aset yang besar maka akan semakin besar pendapatan. Sedangkan jumlah anggota keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan rumah tangga, artinya semakin besar jumlah anggota keluarga, maka akan semakin kecil pendapatan keluarga.

Hayati (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa variabel lokasi geografis, jumlah anggota rumah tangga, karakteristik kepala rumah tangga (jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan), serta variabel bantuan kredit usaha untuk penanggulangan kemiskinan, didapati bahwa penyebab tingginya resiko kemiskinan rumah tangga adalah lokasi geografis dan penambahan kebijakan dengan memprioritaskan pembangunan wilayah pedesaan dan pengendalian terhadap laju pertumbuhan

3. METODE

3.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda, untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan, jumlah tanggungan dan kepemilikan aset terhadap kemiskinan. Maka analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model ekonometrika dengan model sebagai berikut:

$$\text{Log}(Y) = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

dimana: Y adalah variabel kemiskinan; α adalah bilangan konstanta; β_1 adalah koefisien regresi tingkat pendidikan; β_2 adalah koefisien regresi jumlah tanggungan; β_3 adalah koefisien regresi kepemilikan aset; X_1 adalah tingkat pendidikan; X_2 adalah jumlah tanggungan; X_3 adalah kepemilikan aset; dan e adalah *error term*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pendapatan Kepala Keluarga dan Pendapatan Per Kapita Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Variabel kemiskinan dalam penelitian ini diukur dengan melihat pendapatan per bulan dari kepala keluarga. Pada variabel ini pertanyaan yang digunakan untuk melihat pendapatan kepala keluarga dengan menggunakan pertanyaan terbuka, sehingga kepala keluarga dapat menjawab pendapatan yang mereka terima selama satu bulan.

Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan kepala keluarga miskin. Oleh karena itu berikut ini merupakan hasil dari tabulasi silang pendapatan kepala keluarga berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh kepala keluarga.

Tabel 3. Pendapatan kepala keluarga berdasarkan tingkat pendidikan terakhir

	Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga					Total
	Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA	> SMA	
≤ Rp 500.000	-	2	-	-	-	2
	0%	2,5%	0%	0%	0%	2,5%
Rp 510.000-Rp 1.000.000	3	6	11	1	-	21
	3,75%	7,5%	13,75%	1,25%	0%	26,25%
Pendapatan Kepala Keluarga (Per Bulan)	4	10	9	5	1	29
	5%	12,5%	11,25%	6,25%	1,25%	36,25%
Rp 1.100.000-Rp 1.500.000	1	5	2	4	-	12
	1,25%	6,25%	2,50%	5,00%	0%	15%
Rp 1.600.000-Rp 2.000.000	1	3	2	1	-	7
	1,25%	3,75%	2,5%	1,25%	0%	8,75%
Rp 2.100.000-Rp 2.500.000	-	2	1	5	1	9
	0%	2,5%	1,25%	6,25%	1,25%	11,25%
> Rp 2.500.000	9	28	25	16	2	80
	11,25%	35%	31,25%	20%	2,5%	100%

Sumber: Data Primer (diolah)

Tabel 3 di atas menunjukkan pendapatan kepala keluarga perbulan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir kepala keluarga. Hasil tabulasi menunjukkan bahwa pendapatan ≤ Rp 500.000 pada penelitian ini, hanya dimiliki oleh kepala keluarga dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 2,5% dengan jumlah 2 responden. Pada Frekuensi pendapatan kepala keluarga Rp 510.000 – Rp 1.000.000 memiliki persentase terbesar ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan persentase sebesar 13,75% dengan jumlah responden sebanyak 11 responden, kedua berada di tingkat Sekolah Dasar dengan persentase sebesar 7,5% dengan responden sebanyak 6 kepala keluarga, selanjutnya, Tidak Tamat SD dengan persentase sebesar 3,75% dengan responden sebanyak 3 responden dan yang terakhir untuk frekuensi ini adalah tingkat SMA dengan persentase sebesar 1,25% dengan jumlah responden sebanyak 1 responden.

Frekuensi pendapatan selanjutnya yaitu Rp 1.100.000- Rp 1.500.000 pada frekuensi ini persentase terbesar berada di tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan persentase sebesar 12,5% dengan responden sebanyak 10 reponden, kedua berada ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan persentase sebesar 11,25% dengan reponden sebanyak 9 responden, selanjutnya yaitu tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMA) sebesar 6,25% dengan responden sebanyak 5 responden kemudian Tidak Tamat SD dengan persentase sebesar 5% dengan responden sebanyak 4 responden dan yang terakhir adalah diatas Sekolah menengah Atas (>SMA) dengan persentase sebesar 1,25% dengan responden sebanyak 1 responden.

Selain itu, frekuensi Pendapatan selanjutnya yaitu Rp 1.600.000-Rp 2.000.000 pada frekuensi ini persentase terbesar terdapat pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar sebesar 6,25% dengan responden sebanyak 5 responden kemudian tingkat SMA sebesar 5% dengan responden sebanyak 4 responden selanjutnya SMP dan Tidak Tamat SD dengan masing-masing persentase sebesar 2,5% dan 1,25%. Frekuensi selanjutnya yaitu dengan pendapatan per bulan sebesar Rp 2.100.000 – Rp Rp 2.500.000 memiliki persenase terbesar dengan angka 6,25% pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tingkat yang lain pada frekuensi ini masih berada di angka 2% dan 1%. Selanjutnya pendapatan diatas Rp 2.500.000 persentase terbesar dimiliki oleh kepala keluarga dengan tingkat pendidikan SMA dengan persentase 6,25%.

Hasil dari tabulasi silang pendapatan kepala keluarga dengan tingkat pendidikan terakhir kepala keluarga tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan > Rp 2.500.000 terbesar dimiliki oleh kepala

keluarga dengan tingkat pendidikan SMA. Sedangkan untuk pendapatan yang masih rendah seperti dibawah < Rp 1.500.000 masih banyak dimiliki oleh kepala keluarga dengan tingkat pendidikan < SMP. Dapat dilihat persentase kepala keluarga dengan pendapatan kurang dari Rp 1.500.000 dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama Kebawah (<SMP) mencapai 56,3%.

Tabel 4. Pendapatan per kapita berdasarkan tingkat pendidikan terakhir

	Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga					Total	
	Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA	> SMA		
Pendapatan Per Kapita (Per Bulan)	< Rp 100.000	-	1	-	-	-	1
		0%	1,3%	0%	0%	0%	1,3%
	Rp 110.000 - 150.000	-	2	3	-	-	5
		0%	2,5%	3,75%	0%	0%	6,25%
	Rp 160.000 - Rp 200.000	5	3	3	-	-	11
		6%	3,8%	3,75%	0%	0%	13,75%
	Rp 210.000 - Rp 250.000	1	1	4	-	-	6
		1,25%	1,25%	5%	0%	0%	8%
	Rp 260.000 - Rp 300.000	1	4	5	2	-	12
		1,25%	5%	6,3%	2,5%	0%	15,00%
> Rp 300.000	2	17	10	14	2	45	
	3%	21,3%	12,5%	17,5%	2,5%	56,25%	
Total	9	28	25	16	2	80	
	11,25%	35%	31,25%	20%	2,5%	100%	

Sumber: Data Primer (diolah)

Berdasarkan Tabel 4 diatas responden yang memiliki pendapatan rendah atau dengan pendapatan perkapita masih dibawah garis kemiskinan merupakan responden dengan taraf pendidikan kepala keluarga yang masih berada dibawah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan responden yang memiliki taraf pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagian besar memiliki pendapatan perkapita diatas garis kemiskinan.

Pendapatan Kepala Keluarga dan Pendapatan Per Kapita Berdasarkan Jumlah Tanggungan Jumlah tanggungan dalam penelitian ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan kepala keluarga. Variabel jumlah tanggungan kepala keluarga dilihat dengan melakukan pertanyaan secara langsung jumlah tanggungan kepala keluarga tersebut untuk menghitung pengaruhnya terhadap pendapatan dari kepala keluarga.

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat pendapatan kepala keluarga perbulan dan juga jumlah tanggungan kepala keluarga. Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa pada frekuensi pendapatan pertamayaitu ≤ Rp 500.000 terdapat dua tesponden yang masing-masing memiliki jumlah tanggungan antara 1-2 dan 3-4 dengan persentase masing-masing sebesar 1,25%. Selanjutnya pendapatan antara Rp 510.000 – Rp 1.000.000 pada frekuensi ini responden yang memiliki persentase terbesar adalah responden yang memiliki jumlah tanggungan antara 3-4 tanggungan dengan persentase 13,75% dan pada frekuensi ini terdapat jumlah tanggungan yang lebih dari 6 tanggungan dengan persentase sebesar 2,5%. Selanjutnya pendapatan diantara Rp 1.100.000 – Rp 1.500.000 persentase terbesar adalah kepala keluarga yang memiliki tanggungan diantara 3-4 tanggungan dengan persentase 18,75% yang juga merupakan persentase terbesar dalam penelitian ini, di frekuensi ini juga masih terdapat kepala keluarga yang memiliki jumlah tanggungan 5-6 dan lebih dari 6 (>6) dengan persentase masing- masing 6,25% dan 1,25%.

Tabel 5. Pendapatan kepala keluarga berdasarkan jumlah tanggungan

	Jumlah Tanggungan Kepala Keluarga				Total	
	1-2	3-4	5-6	>6		
Pendapatan Kepala Keluarga (Per Bulan)	≤ Rp 500.000	1 1,25%	1 1,25%	- 0%	- 0%	2 2,5%
	Rp 510.000-Rp 1.000.000	7 8,75%	11 13,75%	1 1,25%	2 2,5%	21 26,25%
	Rp 1.100.000-Rp 1.500.000	8 10%	15 18,75%	5 6,25%	1 1,25%	29 36,25%
	Rp 1.600.000-Rp 2.000.000	2 2,5%	8 10%	1 1,25%	1 1,25%	12 15%
	Rp 2.100.000-Rp 2.500.000	1 1,25%	5 6,25%	1 1,25%	- 0%	7 8,75%
	> Rp 2.500.000	1 1,25%	8 10%	- 0%	- 0%	9 11,25%
	Total	20 25%	48 60%	8 10%	4 5%	80 100%

Sumber: Data Primer (diolah)

Selanjutnya, pendapatan antara Rp 1.600.000 – Rp 2.000.000 persentase terbesar terdapat pada jumlah tanggungan kepala keluarga diantara 3-4 tanggungan dengan persentase 10% dan pada frekuensi ini juga masih terdapat jumlah tanggungan 5-6 tanggungan dan > 6 dengan persentase masing-masing sebesar 1,25%. Untuk pendapata diantara Rp 2.100.000 – Rp 2.500.000 memiliki persentase terbesar pada jumlah tanggungan 3-4 tanggungan dengan persentase 6,25%. Selanjutnya pendapatan diatas Rp 2.500.000 memiliki persentase terbesar pada 3-4 tanggungan dengan persentase sebesar 10% dan pada pendapatan > Rp 2.500.000 ini responden cenderung memiliki jumlah tanggungan yang rendah.

4.2. Pendapatan Kepala Keluarga dan Pendapatan Per Kapita Berdasarkan Asset Kepala Keluarga

Asset merupakan salah satu variabel yang diduga akan mempengaruhi pendapatan kepala keluarga. Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah pertanyaan secara langsung untuk mengetahui asset yang dimiliki. Asset dinilai dengan melihat asset yang dimiliki oleh kepala keluarga tersebut seperti kebun, ternak kendaraan dan lainnya.

Tabel 6 menunjukkan hasil tabulasi silang pendapatan kepala keluarga per bulan dan asset yang dimiliki oleh kepala keluarga dari hasil tersebut dapat dilihat, pada pendapatan ≤ Rp 500.000 terdapat masing-masing 1,25% yang tidak memiliki asset dan hanya memiliki motor, selanjutnya pendapatan Rp 510.000 – Rp 1.000.000 terdapat 13,75% responden memiliki motor, 12,5% reponden tidak memiliki asset dan 1,25% responden memiliki kebun, selanjutnya pendapatan antara Rp 1.100.000 – Rp 1.500.000 ini terdapat persentase terbesar dengan jumlah 23,75% responden yang memiliki motor dan 8,75% yang tidak memiliki asset dan 3,75% yang memiliki kebun, untuk pendapatan Rp 1.600.000 – Rp 2.000.000 persentase responden yang memiliki motor sebesar 11,25%, yang tidam memiliki asset 2,50% dan yang memiliki kebun 1,25%. Selanjutnya Rp 2.100.000 – Rp 2.500.000 memiliki persentase 7,50% yang memiliki motor dan 2,50% yang memiliki kebun pada frekuensi pendapatan kali ini tidak ada responden yang tidak memiliki asset dan pendapatan diatas Rp 2.500.000 memiliki persentase 3,75% memiliki motor dan 5% memiliki kebun. Dari tabulasi silang tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan yang lebih besar memiliki asset yang lebih besar juga dan yang tidak memiliki asset cenderung dari responden yang memiliki pendapatan yang rendah.

Tabel 6. Pendapatan kepala keluarga berdasarkan asset yang dimiliki

	Asset Kepala Keluarga			Total
	Tidak Memiliki Asset	Motor	Kebun	
≤ Rp 500.000	1 1,25%	1 1,25%	- 0%	2 2,5%
Rp 510.000-Rp 1.000.000	10 12,5%	11 13,75%	1 1,25%	21 26,25%
Pendapatan Kepala Keluarga (PerBulan)				
Rp 1.100.000-Rp 1.500.000	7 8,75%	19 23,75%	3 3,75%	29 36,25%
Rp 1.600.000-Rp 2.000.000	2 2,50%	9 11,25%	1 1,25%	12 15%
Rp 2.100.000-Rp 2.500.000	- 0%	6 7,50%	2 2,50%	8 10%
> Rp 2.500.000	- 0%	3 3,75%	4 5,00%	8 10%
Total	20 25%	49 61,25%	11 13,75%	80 100%

Sumber: Data Primer (diolah)

4.3. Pengujian Statistik

Berdasarkan hasil estimasi model menunjukkan bahwa nilai $Adj-R^2$ sebesar 0.232159 hal ini menunjukkan bahwa variabel kemiskinan mampu dijelaskan oleh variabel tingkat pendidikan, jumlah tanggungan dan asset sebesar 23.2159% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak termasuk didalam model.

Selanjutnya, hasil estimasi didapatkan nilai f-statistik dari model regresi sebesar 8,961971 dengan nilai Prob (f-statistik) 0,000037. Dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ diketahui bahwa nilai f tabel sebesar 2.72. Maka nilai f-statistik sebesar 8,961971 lebih besar daripada F-tabel sebesar 2.72. Sehingga variabel tingkat pendidikan, jumlah tanggungan dan asset secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan hasil estimasi diketahui nilai t-statistik untuk variabel tingkat pendidikan kepala keluarga (X1) sebesar 3,623517 dengan tingkat signifikansi 95% atau $\alpha = 5\%$ maka diketahui t-tabel sebesar 1.66412. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai t-statistik tingkat pendidikan (X1) lebih kecil besar dari t-tabel atau $2.581493 > 1.66412$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Kemudian variabel jumlah tanggungan kepala keluarga memiliki t-statistik sebesar 1,545522 dengan tingkat signifikansi 95% atau $\alpha = 5\%$ maka diketahui t-tabel sebesar 1.66412. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai t-statistik jumlah tanggungan lebih kecil dari t-tabel atau $1.545522 < 1.66412$ sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah tanggungan tidak mempengaruhi pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya, variabel Asset kepala keluarga memiliki t-statistik sebesar 3.727578 dengan tingkat signifikansi 95% atau $\alpha = 5\%$ maka diketahui t-tabel sebesar 1.66412. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai t-statistik asset lebih besar dari t-tabel atau $3.727578 > 1.66412$ sehingga dapat disimpulkan bahwa asset memiliki mempengaruhi pengaruh signifikan terhadap kemiskinan

4.3. Pengujian Asumsi Klasik

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel independen tidak ada yang lebih dari 0.80 atau masih berada dibawah angka 0.80, sehingga model dalam penelitian ini bebas dari masalah Multikolinearitas. Selain itu, hasil perhitungan diatas didapatkan hasil *Obs R-squared* sebesar 3.405899. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 5\%$ dengan n berjumlah 80 dan k sebanyak 3, sehingga didapatkan nilai chi-square sebesar 101.87947. Nilai *Chi-Square* lebih besar dari pada nilai *Obs R-squared* $2.655193 < 101.8755193$ sehingga model dalam penelitian ini bebas dari masalah heterokedastisitas.

Sementara itu, untuk hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai Prob. Chi-Square sebesar 0.7517. Nilai tersebut lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini bebas dari Autokorelasi. Kemudian hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai Jarque - Bera sebesar 1,128773 dengan tingkat signifikansi 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan nilai X_2 tabel sebesar 101.87947. Maka nilai *Jarque – Bera* tabel memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai X_2 sehingga data terdistribusi normal.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Semakin baiknya pendidikan kepala keluarga maka akan berpengaruh meningkatkan pendapatan kepala keluarga. Pada penelitian ini variabel pendidikan diukur dengan melihat pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh kepala keluarga. Hal ini sesuai dengan asumsi human capital theory, yaitu seseorang dapat meningkatkan penghasilannya dengan peningkatan pendidikan. Sehingga jika kepala keluarga mendapatkan mutu pendidikan yang lebih tinggi maka kepala keluarga tersebut akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan jaminan pendapatan yang lebih besar.

Berdasarkan hasil tabulasi silang antara pendapatan kepala keluarga dan pendidikan terakhir kepala keluarga. Menunjukkan bahwa, Pendapatan kepala keluarga diatas Rp 2.500.000 persentase terbesar dimiliki oleh kepala keluarga dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan, pendapatan dibawah Rp 1.000.000 sebagian besar dimiliki oleh kepala keluarga dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama kebawah (\leq SMP). Sehingga hasil tabulasi silang ini membuktikan bahwa semakin baiknya tingkat pendidikan kepala keluarga maka akan semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Putri dan Setiawina. Bahwa, pendidikan berpengaruh positif terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Artinya tingkat pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan. Tingkat pendidikan reponden sangat mempengaruhi besarnya pendapatan seorang responden. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka pekerjaan dan pendapatannya akan semakin layak dan meningkat.

4.4.2. Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Kemiskinan

Variabel jumlah tanggungan dalam penelitian ini tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan yang diukur dengan pendapatan kepala keluarga. Jumlah tanggungan didalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kemiskinan karena kemiskinan dipenelitian ini diukur dengan menggunakan pendapatan kepala keluarga, sehingga berapapun jumlah tanggungan kepala keluarga tidak akan berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang diterima oleh kepala keluarga.

Berdasarkan hasil tabulasi silang antara pendapatan kepala keluarga dengan jumlah tanggungan kepala keluarga. Menunjukkan bahwa, pendapatan kepala keluarga tidak begitu dipengaruhi oleh jumlah tanggungan kepala keluarga. Dari hasil tabulasi tersebut dapat dilihat bahwa jumlah tanggungan 1-2 tanggungan persentase terbesarnya berada di pendapatan kepala keluarga sebesar Rp. 1.100.000 – Rp 1.500.000 sedangkan jumlah tanggungan terbesar yaitu ≥ 7 tanggungan persentasenya berbanding tipis antara Rp 500.000 – Rp 1.000.000 dengan persentase 2,5% dan Rp 1.100.000 – Rp. 1.500.00 sebesar 1,25%.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2012) yang menunjukkan bahwa jumlah tanggungan mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga. Perbedaan ini disebabkan oleh pada penelitian ini kemiskinan diukur dengan hanya menggunakan pendapatan kepala keluarga. Sehingga jika terdapat salah satu tanggungan keluarga yang sudah bekerja maka tidak akan ditambahkan ke dalam pendapatan kepala keluarga sehingga dalam penelitian ini pendapatan tidak begitu dipengaruhi oleh jumlah tanggungan kepala keluarga. Akan tetapi dalam penelitian ini jumlah keluarga akan memperbesar biaya konsumsi per hari yang dikeluarkan oleh kepala keluarga sehingga akan memperkecil pendapatan yang telah didapatkan

oleh kepala keluarga.

4.4.3. Pengaruh Kepemilikan Asset Terhadap Kemiskinan

Variabel kepemilikan asset dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pada penelitian ini variabel kepemilikan asset dilihat dengan asset yang dimiliki oleh kepala keluarga yang berupa barang mewah atau berupa asset yang dapat menghasilkan seperti kebun dan ternak. Pada penelitian ini hasil dari variabel asset menunjukkan pengaruh yang positif yang berarti semakin banyak asset yang dimiliki maka akan semakin besar juga pendapatan dari kepala keluarga.

Berdasarkan hasil dari tabulasi silang antara pendapatan kepala keluarga dan juga asset yang dimiliki kepala keluarga menunjukkan bahwa, kepala keluarga dengan pendapatan diatas Rp 2.500.000 merupakan kepala keluarga yang memiliki kebun dengan persentase 5%, sedangkan kepala keluarga yang memiliki pendapatan dibawah Rp 500.000 merupakan kepala keluarga yang tidak memiliki asset dengan persentase 1,25%. Sehingga dari hasil tabulasi ini dapat diketahui bahwa semakin besar asset yang dimiliki kepala keluarga maka akan semakin besar juga pendapatan kepala keluarga. Seperti pada hasil survey dengan kepemilikan asset kepala keluarga berupa kebun, maka pendapatan kepala keluarga akan bertambah jika musim panen telah tiba.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sa'diyah & Fitri (2012), bahwa kepemilikan asset berpengaruh positif terhadap kemiskinan rumah tangga, dimana setiap ada penambahan asset maka akan bertambah pendapatan. Artinya semakin kecil asset yang dimiliki masyarakat, semakin kecil pula pendapatan per kapita masyarakat yang diteliti, berarti kualitas hidupnya semakin miskin.

5. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini antara lain: (1) hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan kepala keluarga sehingga semakin tinggi pendidikan kepala keluarga maka akan semakin besar pendapatan; (2) hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tanggungan kepala keluarga tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap pendapatan kepala keluarga. Sehingga, berapa pun jumlah tanggungan tidak akan berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan kepala keluarga; dan (3) hasil penelitian menunjukkan bahwa asset yang dimiliki kepala keluarga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan kepala keluarga sehingga semakin besar asset yang dimiliki maka semakin besar pendapatan kepala keluarga.

REFERENSI

- Abukosim, Saleh, M.S., Marwa, Taufiq. 2010. Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 1-11.
- Bachri, Fachrizal. 2010. Pembangunan Kota Pagar Alam Dan Prospeknya Di Masa Depan Ditinjau Dari Aspek Pengeluaran Dana Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 31-39
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Pagaralam Dalam Angka 2015*. Pagaralam: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Indeks Kemiskinan Manusia 2012*. Pagaralam: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Sumatera Selatan dalam Angka 2015*. Palembang: Badan Pusat Statistik
- BAPPEDA Kota Pagaralam. 2015. *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagaralam Tahun 2015*. Pagaralam: Bappeda Kota Pagaralam
- BAPPEDA Kota Pagaralam. 2015. *Millenium Development Goals Kota Pagaralam 2015*. Pagaralam: BAPPEDA Kota Pagaralam
- BAPPENAS. *Laporan Akhir Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I*. 2010

- Hayati, A. 2012. *Analisis Resiko Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Banten*. Tesis. Program Pascasarjana. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Jinghan, M. L. 2008. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, www.kemenkeu.go.id, www.djpk.kemenkeu.go.id
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Latief, Djumilah, 1997, Akselerasi Penggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wilayah, *Jurnal Pembangunan Daerah*
- Maipita, Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mankiw, Gregory. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nasir, Muhammad, dkk. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo. Eksekutif*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2008
- Nurkse, Ragnar. 1961. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. New York: Oxford University Press.
- Pramono, St Agung, Dwi. 2012. *Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga. Journal of Economics and Policy* 5 (2), 137-146.
- Sa'diyah Y. H., & Fitrie, A. (2012). Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Melalui Faktor-Faktor Yang Memoengaruhinya di Kecamatan Tugu Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 1-11.
- Sharp, Ansel, Charles, Register., & Grimes, Paul. 2012. *Economics of Social Issues* (20th Edition). Chicago: Mcgraw-hill Economics Series.
- Todaro, M. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Vidiawan, Eka. & Tisnawati, Ni Made. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga dan Pendidikan Terhadap Jumlah Konsumsi Rumah Tangga Miskin Di Desa Batu Kandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(4), 220-348.